

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdul Latif, 2009. *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan Pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi, S.H., 2022. *Hukum Pidana Materil Dan Formil KORUPSI di Indonesia*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Alfitra. 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP: korupsi, money laundering & trafficking*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Arief, M.I., 2022. *Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan Dan Diskresi Antara Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana (Korupsi)*. Banten: MCL Publisher.
- Andi Hamzah, 2004. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chaerudin, 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmad, 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Desmawati, R., Muzhiffarah, N., Ratnasari, L., Simanjuntak, C., Ratnawati, O., Sholekah, A.A., Lailiah, T., Prahardini, G., Iqbal, M., Priyanto, R.D. and Rumah, P.P. 2020. *Dinamika Korupsi di Indonesia: Buku Pendidikan Antikorupsi*. Penerbit Pustaka Rumah Cinta.

- Romli Atma Sasmita, 2004. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Ermansjah Djaja, 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Evi Hartanti, 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Elwi Danil, 2012. *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fuady, M., 2004. *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih*. Bandung: Citra Aditia Bhakti
- Iqbal Hasan, 2004. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Juniver Girsang, 2012, *Abuse of power: Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*. JG Publisher.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006. *Memahami Untuk Membasmi Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Leden Marpaung, 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lina Sayekti, 2020. *Dalam Menghadapi Pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja*. Jakarta: ILO Report
- Marzuki, 1983. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset.

- Nur Basuki Minarno, 2009. *Penyalahgunaan wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Risqi Perdana Putra, 2020. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Deepublish
- Ridwan HR, 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutaryo, 2020. *Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suhendar, 2015. *Konsep Kerugian Uang Negara : Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Dan Pidana, Khusus Korupsi*, Malang: Setara Press.
- Soerjono Soekanto, 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto-Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Theodorus M.Tuanakotta, 2009. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba Empat
- W.J.S Poerwadarminta, 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4150

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang  
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk  
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam  
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian  
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana Lembar Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran  
Negara Tahun 2023 Nomor 6842

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah  
diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Berita Negara Tahun 2012 Nomor 540

### 3. Jurnal dan Skripsi

Nurul Qamar, 2014. Wewenang Dalam Konsep Hukum dan Kekuasaan, *Jurnal Ilmiah Hukum*.

Hastin, M. and Fakhlur, F., 2023. Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) dalam Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Penyelenggara Negara. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, Edisi 8 Volume 7.

Musahib, A.R., 2015. *Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*. Disertasi: Universitas Tadulako.

Rini, N.S., 2018. Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Edisi 18 Volume (2)*.

Suharto, E. 2015. Peran perlindungan sosial dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia: Studi kasus program keluarga harapan. *Sosiohumaniora*.

Solihah, R., & Triono, T. 2020. Peran KPK dalam mengawal Pengalokasian Dana Bantuan Sosial Di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*.

Yamali, F. R., & Putri, R. N. 2020, *Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, Ediai 4 Volume (2).

#### 4. Kamus

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2017. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kelima. Jakarta: Balai Pustaka.

Bryan A. Garner, 2004. *Blacks Law Dictionary Ninth Edition*. USA: Thomson West.

S.Wojowaito-W.J.S Poerwadarminta, 1980. *Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Bandung: Hasta.

#### 5. Sumber lainnya

BPK RI, “Penyelidikan Kasus Dana Covid-19 Dihentikan”,  
<https://sumbar.bpk.go.id/penyelidikan-kasus-dana-covid-19-dihentikan/>,  
diakses pada 31 Mei 2023 pukul 10.00 WIB.

CNN Indonesia, “DPRD Sumbar Usut Mark Up Harga Hand Sanitizer”,  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210224131726-32-610319/dprd-sumbar-usut-mark-up-harga-hand-sanitizer-dari-dana-covid>,  
di kunjungi pada 1 Juni 2023, dikunjungi pada 31 Mei 2023, Pukul 21.00 WIB

<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/380/pdf>  
dikunjungi pada tanggal 7 September 2021, Jam 21:25

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135058/keppres-no-11-tahun-2020>  
dikunjungi pada tanggal 1 September 2021, Jam 22:22 Wib

<https://www.antaraneews.com/covid-19> dikunjungi pada tanggal 21 Maret 2022,  
Jam 21.48 Wib

Kompas.com, “Sederet Fakta Dugaan Korupsi Dana Covid-19 Sumbar, Mark Up Hand Sanitizer Rp 4,9 Miliar hingga Pansus Usir Pejabat OPD”,  
<https://regional.kompas.com/read/2021/02/24/18353551/sederet-fakta->

dugaan-korupsi-dana-covid-19-sumbar-mark-up-hand-sanitizer-  
rp?page=all, dikunjungi pada 1 Juni 2023

Kominfo, realisasi bantuan sosial, [https://kominfo.go.id/content/detail/30409/realisasi-bantuan-sosial-tunai-capai-82-untuk-jaga-daya-beli-masyarakat/0/virus\\_corona](https://kominfo.go.id/content/detail/30409/realisasi-bantuan-sosial-tunai-capai-82-untuk-jaga-daya-beli-masyarakat/0/virus_corona) dikunjungi pada tanggal 9 September 2021, Jam 20:00 Wib

Novia Harlina, “*Polisi Hentikan Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Covid-19 Sumbar, Ada Apa?*”, Liputan 6, diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4589774/polisi-hentikan-kasus-dugaan-korupsi-anggaran-covid-19-sumbar-ada-apa>, pada 2 Juli 2021.

Sumbarprov.go.id,, “Alokasi APBD Covid-19” <https://dprd.sumbarprov.go.id/home/berita/1/1270> dikunjungi pada 30 Juni 2023

Indonesian Corruption Watch, “HASIL PEMANTAUAN TREN PENINDAKAN KASUS KORUPSI TAHUN 2021”, <https://antikorupsi.org/id/article/laporan-akhir-tahun-icw-2020>, dikunjungi pada 30 Juni 2023

Tim alodokter, <https://www.alodokter.com/virus-corona>, dikunjungi pada tanggal 1 September 2021

Tim bisnistempo. <https://bisnis.tempo.co/read/1464167/lengkap-cara-cek-penerima-bansos-bst-pkh-bpnt-bltdana-desa-dan-bltdumkm> dikunjungi pada tanggal 9 September 2021

Tim detikcom, Perusahaan Pemasok Hand Sanitizer Baru Didirikan <https://sumbar.bpk.go.id/perusahaan-pemasok-hand-sanitizer-baru-didirikan/> dikunjungi pada tanggal 1 September 2021

Tim detikcom, Ini 5 Rekomendasi Pansus DPRD Sumbar soal Dugaan  
Penyelewengan Dana COVID”, <https://news.detik.com/berita/d-5474393/ini-5-rekomendasi-pansus-dprd-sumbar-soal-dugaan-penyelewengan-dana-covid>, dikunjungi pada 31 Mei 2023

Tim tribunews, Modus Korupsi Bansos Covid-19  
<https://www.tribunnews.com/tag/modus-korupsi-bansos-covid-19>  
dikunjungi pada tanggal 1 September 2021

Worldometers.info/coronavirus, dikunjungi pada tanggal 15 November 2021

